

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TEPIAN SUNGAI, KASUS KAWASAN KELURAHAN BAAMANG HILIR TEPIAN SUNGAI MENTAYA, KECAMATAN BAAMANG, SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH

Ribka Yunithea^{1)*}

^{1)*}Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, ribka.yaya@gmail.com

*Penulis Korespondensi: ribka.yaya@gmail.com

Masuk: 08-02-2023, revisi: 20-02-2023, diterima untuk diterbitkan: 10-04-2023

Abstrak

Kabupaten Kotawaringin Timur dikenal sebagai kota dengan kehidupan yang berkaitan dengan sungai, terutama Sungai Mentaya yang menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat kota itu sendiri. Kelurahan Baamang Hilir merupakan kelurahan yang tergolong sebagai kawasan permukiman kumuh dan padat di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kehidupan masyarakat yang berada di Kelurahan Baamang Hilir bergantung pada wilayah tempat tinggal, namun kurang diimbangi dengan tingkat kesadaran dan kepedulian untuk merawat serta menjaga kelestarian lingkungan permukiman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik lokasi dari segi pencapaian dan kedekatan, kebijakan terkait lokasi objek studi, mengetahui tingkat kekumuhan dan konsep penataan, serta konsep penataan di lokasi lain dengan karakteristik lokasi yang serupa. Analisis dibagi menjadi 4 bagian yaitu analisis lokasi dan tapak, analisis kebijakan, analisis karakteristik permukiman kumuh, dan analisis *best practices*. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan hasil bahwa lokasi objek studi tergolong dalam kumuh sedang hingga tinggi. Aspek prioritas dalam penataan berupa aspek kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana. Sehingga diusulkan penataan rumah di atas air, rumah di atas tanah, perbaikan jalur air bersih, sanitasi MCK, jalan, dan pembuatan TPS. Dengan adanya penataan yang berfokus pada kedua aspek tersebut, maka akan mempengaruhi peningkatan dua aspek lainnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Selain itu konsep penataan yang diusulkan tetap mempertahankan unsur budaya dan sejarah di lokasi objek studi.

Kata kunci: Kawasan; kumuh; penataan; permukiman; tepi sungai

Abstract

Kotawaringin Timur is known as a city with life related to rivers, especially the Mentaya River which is the center of life for the people of the city itself. Baamang Hilir is one of the villages classified as slums and densely packed in Baamang, East Kotawaringin. The lives of the people in Baamang Hilir depend on the area where they live, which is not balanced with the level of awareness and concern to care for and maintain the sustainability of the residential environment. The purpose of this study is to determine the characteristics of the location in terms of achievement and proximity, policies related to the location of the object of study, knowing the level of slums and the concept of structuring, as well as the concept of structuring in other locations with similar location characteristics. The analysis is divided into 4 parts, location and site analysis, policy analysis, slum characteristics analysis, and best practices analysis. Based on the results of the analysis, it was found that the location of the study object was classified as a medium to high slum. Priority aspects in structuring are aspects of the physical condition of buildings and infrastructure. So it is proposed to arrange houses on water, houses above ground, repair of clean waterways, sanitation of MCK, roads, and the creation of TPS. With an arrangement that focuses on these two aspects, it will affect the improvement of two other aspects, namely the social aspect and the economic aspect. In addition, the proposed structuring concept retains cultural and historical elements at the location of the object of study.

Keywords: areas; arrangement; riverbanks; settlements; slums

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Budiharjo (1997), kawasan permukiman kumuh sendiri sangat identik dengan ruang yang tidak layak huni, juga berkaitan terhadap wajah kota itu sendiri, mengingat hal tersebut dapat memicu tentang masalah sosial, lingkungan, dan juga kesehatan. Pemukiman kumuh masih dan selalu menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Di mana pada permasalahan ini, pemerintah dituntut untuk memberi perhatian lebih dan serius guna menanggulangnya. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam masalah ini, mengingat kesadaran masyarakat merupakan elemen penting bagi pemerintah supaya dapat menjaga dan menciptakan lingkungan yang baik dan layak huni.

Kabupaten Kotawaringin Timur cukup dikenal sebagai kota dengan kehidupan yang berkaitan dengan sungai, terutama Sungai Mentaya yang menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat kota itu sendiri, sehingga sangat banyak ditemukan permukiman di sepanjang bantaran Sungai Mentaya, di mana permukiman yang terdapat di sepanjang bantaran Sungai Mentaya pada umumnya adalah rumah tradisional yang dihuni oleh masyarakat asli yang berasal dari Kalimantan sendiri. Rumah tradisional yang terdapat di sepanjang bantaran Sungai Mentaya ini dapat disebut sebagai salah satu permukiman tertua di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas yang relatif besar, yaitu 16.796 km² atau 10,94 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kota dengan jumlah penduduk terpadat di Kalimantan Tengah, sekira 4.66.366 jiwa. Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang RTRW Tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin masuk dalam rencana Kawasan strategi ekonomi. Data awal yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kondisi sarana prasarana di kawasan permukiman yang masih tertinggal.

Kelurahan Baamang Hilir adalah salah satu kelurahan yang tergolong sebagai kawasan permukiman kumuh dan padat di Kecamatan Baamang. Kehidupan masyarakat yang berada di Kelurahan Baamang Hilir bergantung pada wilayah tempat tinggal kurang diimbangi dengan tingkat kesadaran dan kepedulian untuk merawat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan permukiman. Apabila hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka masalah yang terjadi di permukiman akan semakin sulit untuk diatasi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memilih topik Penataan Kawasan Kumuh Tepi Sungai Kelurahan Baamang Hilir, Kotawaringin Timur. Penulis berharap melalui topik penataan ini dapat mengetahui karakteristik dan tingkat kepadatan permukiman kumuh di tepi sungai Kelurahan Baamang hilir sehingga dapat mengatasi masalah yang ada serta tercapainya penataan Kawasan Kumuh Tepi Sungai Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat berdasarkan latar belakang dan kondisi eksisting saat ini adalah tingkat kepadatan permukiman kumuh yang tidak tertata serta minimnya sarana prasarana dan fasilitas umum di Kawasan permukiman.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana karakteristik lokasi objek studi dari segi pencapaian dan kedekatan (proximity)?; Bagaimana kebijakan terkait yang mengatur lokasi objek studi?; Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman, karakteristik lokasi, dan sosial ekonomi di kawasan permukiman kumuh tepi sungai Kelurahan Baamang Hilir?; Bagaimana konsep penataan di lokasi lain dengan karakteristik lokasi yang serupa?

Tujuan Penelitian

Mengetahui karakteristik lokasi objek studi dari segi pencapaian dan kedekatan; Mengetahui kebijakan terkait lokasi objek studi; Mengetahui tingkat kekumuhan dan konsep penataan permukiman kumuh tepi sungai Kelurahan Baamang Hilir; Mengetahui konsep penataan di lokasi lain dengan karakteristik lokasi yang serupa.

Lingkup Penelitian

Penelitian dan penataan permukiman kumuh meliputi kawasan seluas 4,09 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 59 KK, pada Kelurahan Baamang Hilir, Sampit, Kotawaringin Timur.

2. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Permukiman

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perumahan dan Permukiman, dijelaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Pengertian Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, diketahui bahwa tanda sebuah permukiman tidak layak huni yaitu dengan adanya ketidakteraturan bangunan, tingginya tingkat kepadatan bangunan, serta kualitas yang tidak memenuhi syarat seperti kualitas bangunan dan sarana prasarana. Sedangkan berdasarkan UN Habitat (2010), *slum* atau permukiman kumuh adalah kondisi permukiman yang memiliki kualitas buruk serta tidak sehat, bisa menjadi sumber penyakit epidemik yang dapat menular ke wilayah perkotaan.

Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997). Menurut Siswono Yudohusodo (1991), lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut: Kondisi fisik lingkungan tidak memenuhi syarat seperti syarat teknis dan kesehatan, ditandai dengan kurangnya atau tidak tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas lingkungan; Bahan yang digunakan untuk bahan bangunan bersifat semi permanen; Kepadatan bangunan tidak sesuai dengan syarat KDB yang telah diatur dengan kepadatan penduduk yang tergolong sangat tinggi yaitu lebih dari 500 jiwa per Ha; Fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan.

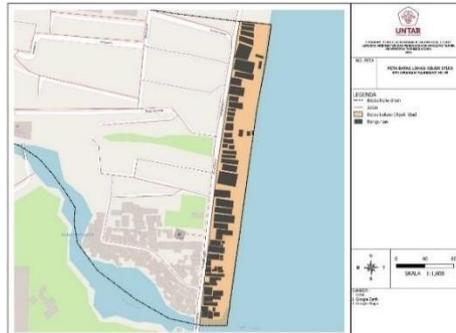
Tipologi Permukiman dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 Pasal 13-14, berdasarkan letak lokasi menurut bioregion, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut: Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air; Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air; Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana; Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.

3. METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar.1 yang menunjukkan kawasan yang terpilih berada di tepi laut.



Gambar 1. Letak Lokasi Objek Studi
Sumber: Google Maps 2022

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 9 bulan, yaitu dimulai pada bulan Mei 2022 sampai Januari 2023.

Batas Penelitian

Berikut ini merupakan batas – batas geografis dari kawasan permukiman tepi Sungai Mentaya.

Tabel 1. Batas – Batas Geografis Dari Kawasan Permukiman Tepi Sungai Mentaya

Batas	keterangan
Batas Utara	Kelurahan Baamang Tengah
Batas Timur	Sungai Mentaya
Batas Selatan	Sungai Pemuatan
Batas Barat	Jalan Usman Harun dan Jalan Baamang Tengah 1, Kelurahan Baamang Hilir

Sumber: Penulis, 2022

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian di kawasan permukiman tepi Sungai Mentaya. Adapun beberapa teknik dalam mengumpulkan data tersebut, yaitu survei lapangan / observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting di lokasi objek studi yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya. Wawancara dilakukan kepada pemerintah setempat untuk mengetahui kondisi lokasi objek studi serta keluhan yang dialami oleh warga. Serta pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengetahui peraturan yang mengatur lokasi objek studi, teori yang berkaitan, dan dokumen lain yang mendukung.

Analisis Data

Dalam mengolah data terdapat beberapa proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Berikut merupakan analisis data yang digunakan pada objek studi kawasan permukiman tepi Sungai Mentaya.

Analisis Lokasi dan Tapak

Analisis ini membahas lokasi objek studi dari segi aksesibilitas / pencapaian dan proximity / kedekatan. Data yang dibahas yaitu bagaimana kemudahan dalam mengakses lokasi objek studi dan sebaran fasilitas di sekitar lokasi objek studi.

Analisis Kebijakan

Analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif yang membahas kebijakan atau regulasi yang berlaku bagi lokasi objek studi.

Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh

Analisis ini menggunakan metode pembobotan atau skoring yang dimodifikasi dari Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan tahun 2006 oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Analisis Best Practises

Analisis ini menggunakan metode *benchmarking* yang bertujuan untuk mengetahui konsep penataan di lokasi lain dengan karakteristik lokasi yang serupa.

Kriteria Skoring

Analisis ini menggunakan metode skoring yang dimodifikasi dari Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan tahun 2006, Oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Pemberian skoring berdasarkan kondisi yang ada di lokasi objek studi. Tingkatan skoring adalah tinggi (40), sedang (30), rendah (20), dan sangat rendah (10). Tabel berikut ini berisi penjelasan mengenai kriteria skoring dalam analisis karakteristik permukiman kumuh.

Tabel 2. Kriteria Skoring Karakteristik Permukiman Kumuh

No	Aspek	Variabel	Bobot			
			40	30	20	10
1	Kondisi Fisik Bangunan	Keteraturan Bangunan	90 – 100% Teratur	70 – 89% Teratur	51 – 69% Teratur	<50% Teratur
		kualitas Bangunan	Mayoritas Permanen Baik	Minoritas Non Permanent Baik	Mayoritas Permanent Buruk	Minoritas Non Permanent Buruk
2	Sosial	Tingkat Pendidikan	> 50% Lulus SMA	> 50% Lulus SMP	> 50% Lulus SD	> 50% Tidak Lulus SD
		Frekuensi Kriminalitas	< 10 Kali / Tahun	10 – 19 Kali / Tahun	20 – 39 Kali / Tahun	> 40 Kali / Tahun
3	Ekonomi	Pendapatan	> 80% di atas UMK	60 – 79% di atas UMK	40 – 59% di atas UMK	< 40% di atas UMK
4	Sarana Prasarana	Pelayanan Air Bersih	> 75% terjangkau PDAM	51 – 75% terjangkau PDAM	25 – 50% terjangkau PDAM	< 25% terjangkau PDAM
		Perkerasan Jalan	> 75% Jalan Aspal / Beton	51 – 75% Jalan Aspal/ Beton	25 – 50% Jalan Aspal/ Beton	< 25% Jalan Aspal/ Beton
		Sanitasi MCK	MCK permanen dan kondisi baik	MCK tidak permanen dan kondisi baik	MCK permanen dan kondisi buruk	MCK tidak permanen dan kondisi buruk
		Pengangkutan Sampah	Seminggu dua kali	Seminggu sekali	Lebih dari seminggu	Tidak terlayani

No	Aspek	Variabel	Bobot			
			40	30	20	10
		Fasilitas Pendidikan	Memadai, kondisi baik	Kurang memadai, kondisi baik	Memadai, kondisi buruk	Kurang memadai, kondisi buruk
		Fasilitas Kesehatan	Memadai, kondisi baik	Kurang memadai, kondisi baik	Memadai, kondisi buruk	Kurang memadai, kondisi buruk
		Fasilitas Peribadatan	Memadai, kondisi baik	Kurang memadai, kondisi baik	Memadai, kondisi buruk	Kurang memadai, kondisi buruk

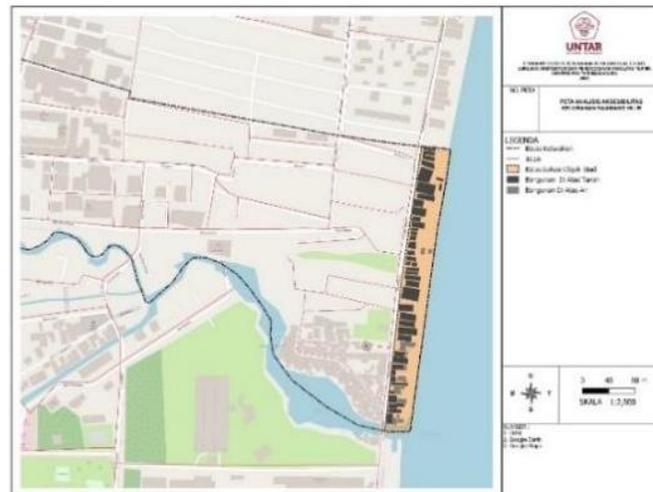
Sumber: Dinas Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

4. DISKUSI DAN HASIL

Analisis Lokasi dan Tapak

Analisis Pencapaian / Aksesibilitas

Berdasarkan peta analisis aksesibilitas terhadap lokasi objek studi diketahui bahwa akses menuju ke lokasi objek studi dapat melalui jalan lokal. Di mana sepanjang lokasi objek studi terdapat jalan lokal yang memanjang utara ke selatan bernama Jalan Usman Harun dan Jalan Baamang Tengah 1.

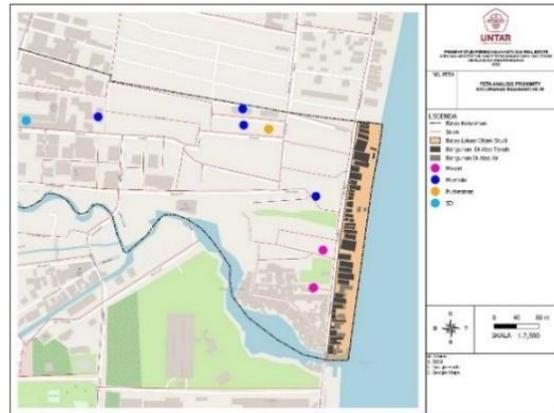


Gambar 2. Peta Analisis Aksesibilitas

Sumber: Open Street Map, Google Earth, dan Google Maps, 2022

Analisis Kedekatan / Proximity

Berdasarkan peta analisis proximity terhadap lokasi objek studi diketahui bahwa terdapat dua masjid, empat musholla, satu puskesmas, dan satu SD. Fasilitas yang tersebar di sekitar lokasi objek studi dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Hal ini dikarenakan jarak antara lokasi objek studi dengan fasilitas berada pada jarak kurang dari 1 km.

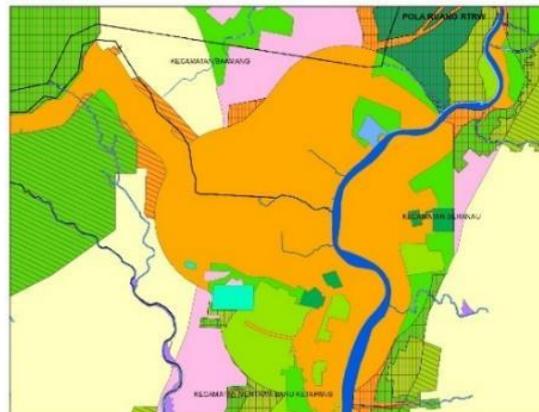


Gambar 3. Peta Analisis Proximity

Sumber: Open Street Map, Google Earth, dan Google Maps, 2022

Analisis Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035, dijelaskan bahwa terdapat rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumber daya air salah satunya di Sungai Mentaya. Sungai ini juga direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan cara adanya penyediaan dan pengelolaan air baku yang meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari dan pertanian.



Gambar 4. RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

Selain itu dijelaskan bahwa kawasan sempadan sungai pada kawasan perkotaan minimal 50m dari tebing dan pedesaan minimal 100m di sepanjang sungai salah satunya Sungai Mentaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kebijakan yang ada, lokasi objek studi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Faktor yang membantu untuk mengembangkan lokasi objek studi karena objek studi berbatasan dengan Sungai Mentaya yang merupakan salah satu sungai besar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi eksisting di lokasi objek studi baik untuk RW 1 maupun RW 2 terdiri dari 70 – 89% teratur dengan kondisi mayoritas permanen baik. Sehingga berdasarkan kategori penilaian pada Tabel 5.2 keteraturan bangunan di lokasi objek studi tergolong dalam kategori kumuh rendah. Sedangkan kualitas bangunan tergolong dalam kategori kumuh sangat rendah.

Tabel 2. Hasil Skoring terhadap Aspek Kondisi Fisik Bangunan

Variabel	RW 1		RW 2	
	Bobot	Keterangan	Bobot	Keterangan
Keteraturan Bangunan	30	70 – 89% Teratur	30	70 – 89% Teratur
Kualitas Bangunan	40	Mayoritas Permanent Baik	40	Mayoritas Permanent Baik

Sumber: Dinas Perkim, 2022

Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Sosial

Berdasarkan kondisi eksisting diketahui bahwa 2 RW yang berada di lokasi objek studi memiliki bobot 20 yang berarti bahwa lebih dari 50% warga telah lulus SD atau pendidikan dasar. Sehingga berdasarkan variabel tingkat pendidikan, lokasi objek studi tergolong dalam kategori kawasan kumuh sedang. Sedangkan untuk variabel frekuensi kriminalitas diketahui memiliki bobot 40 yang berarti frekuensi kriminalitas berjumlah kurang dari 10 kali per tahun. Sehingga berdasarkan variabel frekuensi kriminalitas, lokasi objek studi tergolong dalam kategori kawasan kumuh sangat rendah.

Tabel 3. Hasil Skoring terhadap Aspek Sosial

Variabel	RW 1		RW 2	
	Bobot	Keterangan	Bobot	Keterangan
Tingkat Pendidikan	20	> 50% Lulus SD	20	> 50% Lulus SD
Frekuensi Kriminalitas	40	< 10 Kali / Tahun	40	< 10 Kali / Tahun

Sumber: Kelurahan Baamang Hilir, 2022

Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil skoring diketahui bahwa berdasarkan aspek ekonomi 2 RW yang berada di lokasi objek studi mendapat nilai 10 yang berarti lokasi objek studi tergolong sebagai kawasan kumuh tinggi. Diketahui bahwa pendapatan rata rata penduduk di RW 1 sebesar Rp 650.000,00 – Rp 900.000,00. Sedangkan pendapatan rata rata penduduk di RW 2 sebesar Rp 700.000,00 – Rp 1.100.000,00. Sehingga pendapatan tersebut masih di bawah UMK Kotawaringin Timur yaitu Rp 3.265.848,89.

Tabel 4. Hasil Skoring terhadap Aspek Ekonomi

Variabel	RW 1		RW 2	
	Bobot	Keterangan	Bobot	Keterangan
Pendapatan	10	< 40% di atas UMK	10	< 40% di atas UMK

Sumber: Kelurahan Baamang Hilir, 2022

Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Aspek Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil skoring diketahui bahwa variabel pelayanan air bersih di lokasi objek studi tergolong dalam kategori kumuh sedang. Hal ini dikarenakan hanya 25 – 50% wilayah di lokasi objek studi yang terjangkau oleh PDAM. Untuk variabel perkerasan jalan, lokasi objek studi tergolong dalam kategori kumuh rendah dengan kondisi eksisting berupa 51 – 75% jalan aspal / beton. Sedangkan sisanya masih berupa jalan kayu yang menjadi ciri khas budaya di lokasi objek studi. Pada variabel sanitasi MCK, hasil skoring menunjukkan bahwa lokasi objek studi tergolong dalam kategori kumuh tinggi. Hal ini bisa terjadi karena kondisi sanitasi MCK berupa bangunan tidak permanen dengan kondisi yang buruk. Kondisi eksisting untuk variabel pengangkutan sampah menunjukkan lokasi objek studi termasuk dalam kategori kumuh tinggi. Pengangkutan

sampah tidak terlayani dengan baik yang didukung dengan munculnya timbunan sampah di lokasi objek studi yang dibiarkan hingga menumpuk dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Sedangkan untuk variabel fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan menunjukkan lokasi objek studi termasuk dalam kategori kumuh rendah. Fasilitas yang ada kurang memadai namun memiliki kondisi yang baik.

Tabel 5. Hasil Skoring terhadap Aspek Sosial

Variabel	RW 1		RW 2	
	Bobot	Keterangan	Bobot	Keterangan
Pelayanan Air Bersih	20	25 – 50% terjangkau PDAM	20	25 – 50% terjangkau PDAM
Perkerasan Jalan	30	51 – 75% Jalan Aspal/ Beton	30	51 – 75% Jalan Aspal/ Beton
Sanitasi MCK	10	MCK tidak permanen dan kondisi buruk	10	MCK tidak permanen dan kondisi buruk
Pengangkutan Sampah	10	Tidak terlayani	10	Tidak terlayani
Fasilitas Pendidikan	30	Kurang memadai, kondisi baik	30	Kurang memadai, kondisi baik
Fasilitas Kesehatan	30	Kurang memadai, kondisi baik	30	Kurang memadai, kondisi baik
Fasilitas Peribadatan	30	Kurang memadai, kondisi baik	30	Kurang memadai, kondisi baik

Sumber: Kelurahan Baamang Hilir, 2022

Sehingga secara keseluruhan lokasi objek studi di RW 1 maupun RW 2 Kelurahan Baamang Hilir termasuk dalam kategori permukiman kumuh sedang hingga tinggi. Aspek prioritas untuk RW 1 maupun RW 2 yaitu aspek kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana. Pada aspek kondisi fisik bangunan diperlukan penataan terhadap rumah di atas air. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada rumah di atas tanah, namun berkaitan dengan sarana prasarana pendukung di lokasi objek studi. Selain itu sarana prasarana di lokasi objek studi perlu adanya peningkatan kualitas sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal. Dengan adanya penataan yang berfokus pada kedua aspek tersebut akan mempengaruhi peningkatan dua aspek lainnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi.

Analisis *Best Practices*

Analisis *best practices* menggunakan metode *benchmarking* yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu dengan karakteristik lokasi sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 4 lokasi yang berbeda dengan karakteristik lokasi serupa, lokasi objek studi memiliki karakteristik serupa yaitu permukiman kumuh di tepi sungai. Secara fisik kawasan permukiman di tepi sungai berawal dari budaya masyarakat. Hal ini juga didukung dengan potensi perairan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Namun perkembangan permukiman tersebut tidak terorganisir dengan baik sehingga menimbulkan permukiman yang kumuh. Sehingga berbagai penelitian yang telah dilakukan berfokus pada penataan fasilitas pendukung bagi masyarakat. Penataan tetap mempertahankan konsep rumah di atas air namun akses menuju lokasi objek studi diperbaiki. Penataan cenderung dilakukan bertahap karena tidak semua masyarakat di lokasi objek studi dapat dipindah sekaligus. Sehingga penataan membutuhkan waktu lebih untuk memperbaiki kawasan permukiman yang dibarengi dengan perbaikan akses menuju lokasi objek studi serta fasilitas pendukung.

Konsep Penataan Kawasan Permukiman Tepi Sungai Mentaya

Sungai Mentaya merupakan salah satu sungai utama yang mempengaruhi kegiatan atau aktivitas masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kelurahan Baamang Hilir merupakan kelurahan di Kecamatan Baamang yang kegiatan ekonominya paling berkembang. Namun sayangnya kegiatan ekonomi tersebut belum berkembang secara merata. Kondisi kawasan permukiman di lokasi objek studi memiliki potensi untuk dikembangkan terutama didukung dengan kondisi alam yang mendukung yaitu berbatasan dengan Sungai Mentaya. Meskipun sudah ada RTRW yang mengatur mengenai pola ruang di lokasi objek studi namun pembahasan mengenai lokasi objek studi kurang dibahas atau kurang mendapat perhatian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa lokasi objek studi masih tergolong ke dalam kategori kawasan kumuh tinggi terutama pada aspek ekonomi dan aspek sarana prasarana. Sehingga diperlukan penataan atau perbaikan pada beberapa aspek di lokasi objek studi.

Menurut Dinas Perkim terdapat 5 strategi dalam penataan kawasan permukiman kumuh dengan konsep *collective housing*. Di antara 5 strategi tersebut konsep penataan yang akan dilakukan di lokasi objek studi yaitu perpaduan konsep *on-site reblocking* atau penataan tata letak kawasan dengan konsep *on-site upgrading* atau perbaikan fisik kawasan. Penataan ini terdiri dari penataan rumah, MCK, dan TPS. Selain itu juga terdapat rencana dalam mengoptimalkan fasilitas seperti air bersih dan jalan. Namun penataan ini tetap mempertimbangkan unsur budaya masyarakat yaitu rumah betang. Kegiatan ini dapat berlangsung apabila pemerintah dapat bernegosiasi dengan masyarakat mengenai penataan yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga lokasi objek studi dapat menjadi kawasan permukiman yang bersih dan memadai tanpa melupakan unsur budaya yang ada.

Tujuan Penataan

Tujuan dari penataan di kawasan permukiman kumuh tepi Sungai Mentaya yaitu agar terciptanya kawasan permukiman tepi sungai yang bersih dan memadai bagi masyarakat tanpa melupakan unsur budaya yang ada. Diharapkan kawasan permukiman ini dapat menjadi tempat tinggal warga yang layak serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Konsep penataan ini dapat dijadikan referensi bagi penataan sejenis baik di kawasan lokasi objek studi maupun lokasi lain dengan karakteristik yang serupa.

Arahan Penataan

Penataan lokasi objek studi terarah dengan mempertimbangkan kondisi eksisting objek studi yang terbagi menjadi 5 faktor yaitu: Sosial Ekonomi; Kondisi Fisik Bangunan; Kondisi Wilayah Permukiman; Aksesibilitas; Sarana Prasarana.

Penerapan Arahan Penataan Berdasarkan Faktor

Sosial Ekonomi

Penataan pada faktor sosial ekonomi dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait yang berpengalaman di bidangnya. Sosialisasi yang pertama yaitu mengenai kegiatan bertempat tinggal di kawasan tepi sungai.

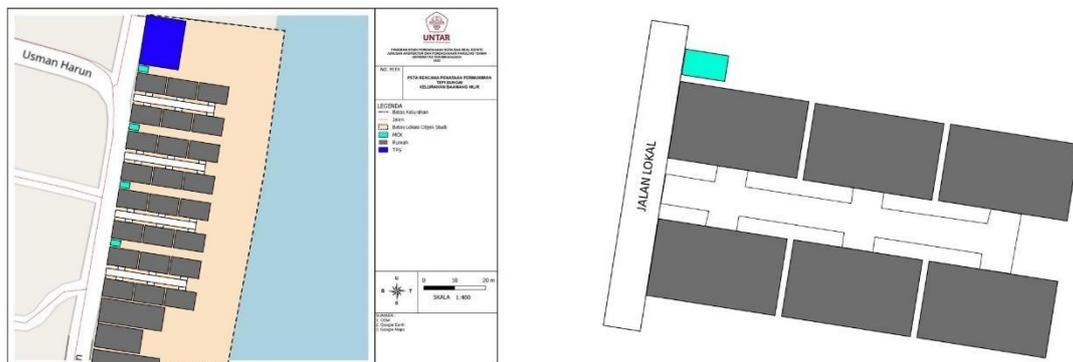
Sosialisasi atau diskusi ini berisi: Arahan mengenai diperlukannya kegiatan penataan ulang permukiman di tepi sungai yang dilakukan secara formal dan informal; Bagaimana proses penataan akan dilakukan; Bagian mana saja yang akan dilakukan penataan; Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam proses penataan permukiman di tepi sungai; Bagaimana cara memanfaatkan Sungai Mentaya untuk menunjang kebutuhan masyarakat

Sosialisasi yang kedua yaitu mengenai kegiatan pendidikan. Sosialisasi ini berisi: Penjelasan mengapa pendidikan itu penting; Mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan; Mencari faktor faktor yang menyulitkan masyarakat dalam proses pendidikan; Penyediaan kursus atau pelatihan kegiatan profesi bagi masyarakat agar kemampuan semakin terasah dan menghasilkan karya dengan nilai tinggi; Mengupayakan agar masyarakat dapat menempuh setidaknya pendidikan dasar; Menyediakan dana bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat menempuh setidaknya pendidikan dasar.

Sedangkan sosialisasi yang terakhir yaitu mengenai kegiatan budaya yang terdapat di masyarakat. Sosialisasi ini berisi: Penjelasan mengapa budaya penting untuk dilestarikan; Mempertahankan hubungan kekerabatan antar masyarakat; Penjelasan mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan demi kenyamanan bersama, misalnya yaitu gotong royong, kerja bakti, atau memilah sampah sebelum dibuang

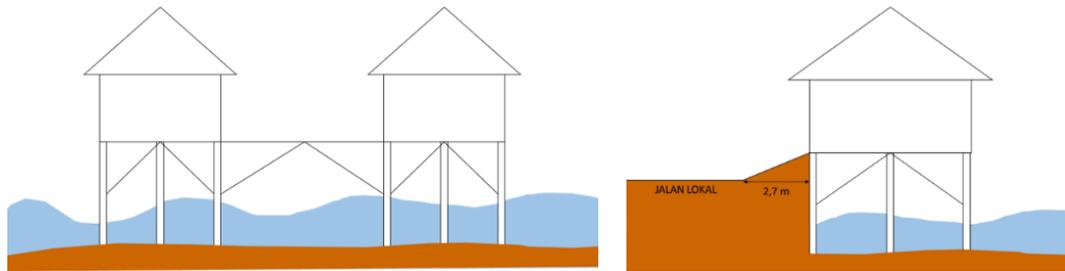
Kondisi Fisik Bangunan

Penataan pada faktor kondisi fisik bangunan berupa keteraturan bangunan dan kualitas bangunan. Bangunan di tepi sungai mayoritas berupa bangunan permanen. Namun bangunan ini perlu dilakukan penataan agar dapat menjadi kawasan permukiman permanen yang teratur. Pada kondisi eksisting terdapat 42 unit rumah di atas tanah dan 17 unit rumah di atas air. Penataan ini dilakukan dengan mempertahankan unsur budaya di masyarakat yaitu berupa rumah di atas air. Akan tetapi rumah di atas air akan dibangun kembali agar lebih rapi, nyaman, dan mudah diakses. Kawasan permukiman dilengkapi dengan MCK bersama. Untuk 17 unit rumah di atas air akan ditata seperti berikut.



Gambar 5. Peta Rencana Penataan (kiri) dan Ilustrasi Penataan Rumah di Atas Air (kanan)
Sumber: penulis, 2022

Rumah di atas air akan dibangun jalan untuk mengakses jalan lokal. Konsep rumah tetap berada di atas air untuk mempertahankan unsur budaya yang sudah melekat di masyarakat. Sehingga setiap jalan berfungsi untuk mengakses 6 unit rumah di atas air. Hal ini hanya dilakukan pada bagian utara lokasi objek studi, sedangkan sisanya tetap mengikuti kondisi eksisting. Sehingga proses penataan lebih berfokus di bagian utara lokasi objek studi. Selain itu terdapat pembuatan TPS untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh warga. Untuk rumah di atas air dilengkapi dengan jalan dari kayu untuk mengakses 6 unit rumah sekaligus. Selain itu di samping 6 unit rumah tersebut terdapat 1 unit MCK bersama. Dengan penataan seperti itu, maka unsur budaya di masyarakat tetap dipertahankan. Jalan untuk mengakses rumah warga berupa jalan kayu dengan model panggung. Sehingga masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman karena model panggung yang menandakan lantai dasar rumah tidak menempel atau tidak terlalu dekat dengan air. Selain itu juga terdapat MCK bersama yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih sehingga bisa digunakan oleh masyarakat.



Gambar 6. Ilustrasi Rumah di Atas Air (kiri) dan di Atas Tanah (kanan)

Sumber: penulis, 2022

Luas rumah mengikuti kondisi eksisting di lokasi objek studi. Namun pada bagian depan rumah kurang lebih dengan jarak 2,7m berupa peninggian. Hal ini ditujukan agar ketika hujan turun atau terjadi banjir, air tidak langsung masuk ke dalam rumah sekaligus sebagai jarak antara jalan dengan bangunan rumah. Bagian depan rumah masih berada di atas tanah, bagian ini merupakan jarak antara bangunan rumah dengan jalan. Namun bangunan rumah sudah berada di atas air. Hal ini dikarenakan lahan yang tersedia tidak bisa mencukupi kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Selain itu terdapat unsur budaya yang perlu dilestarikan yaitu budaya rumah di atas air atau rumah betang. Sehingga warga tetap melestarikan budaya rumah betang yang dimodernisasi dan dilengkapi akses menuju jalan. Sehingga penataan bagi rumah di atas air dan rumah di atas tanah mendapat perlakuan yang berbeda. Terdapat pembangunan ulang bagi seluruh rumah di atas air. Tetapi bagi rumah di atas tanah akan dilakukan penataan namun tidak seluruhnya. Karena ukuran dan lokasi rumah tetap mengikuti kondisi eksisting di lokasi objek studi. Penataan ini juga memperhatikan unsur budaya dan sejarah di masyarakat.

Kondisi Wilayah Permukiman

Kondisi eksisting wilayah permukiman di tepi sungai perlu dilakukan penataan terutama pada bangunan yang terlalu dekat dengan permukaan air. Sehingga bangunan tersebut perlu dibangun kembali dengan akses jalan yang memadai serta lantai dasar bangunan memiliki jarak dengan permukaan air.



Gambar 7. Sampel Rumah yang Terlalu Dekat dengan Permukaan Air

Sumber: penulis, 2022

Apabila kondisi rumah tersebut dibiarkan akan berpengaruh pada kenyamanan dan keselamatan warganya. Terutama akses menuju rumah masih berupa jalan kayu yang kurang layak. Jalan kayu akan tetap dilestarikan namun diperbaiki sehingga dapat lebih kuat dan layak.

Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju lokasi objek studi hanya dapat melalui jalan lokal. Namun kondisi jalan perlu dilakukan perbaikan. Meskipun sebagian besar jalan sudah berupa jalan aspal tetapi masih ditemukan jalan dengan kondisi yang tidak merata. Misalnya yaitu jalan dengan kemiringan

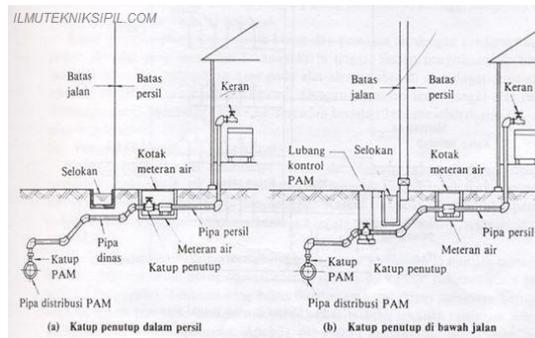
tertentu sehingga air dapat menggenang di jalan dan mengganggu aksesibilitas pejalan kaki maupun kendaraan bermotor. Sehingga perlu dilakukan perbaikan / pengaspalan ulang pada jalan di lokasi objek studi.



Gambar 8. Sampel Jalan yang Perlu Dilakukan Perbaikan
Sumber: penulis, 2022

Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang perlu dilakukan penataan yaitu jaringan air bersih, sanitasi MCK, pembuangan sampah, serta sarana. Sarana ini terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan. Berdasarkan kondisi eksisting diketahui bahwa area yang terjangkau oleh PDAM hanya 25 – 50%, sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan pihak PDAM agar penyaluran air bersih dapat digunakan oleh masyarakat secara merata. Selain itu untuk mengatasi kebutuhan air minum dapat dilakukan dengan cara penyulingan. Air bersih ini akan didistribusikan ke warga di lokasi objek studi. Air tersebut juga disalurkan langsung ke MCK bersama sehingga semua warga mendapat fasilitas air bersih yang sama.



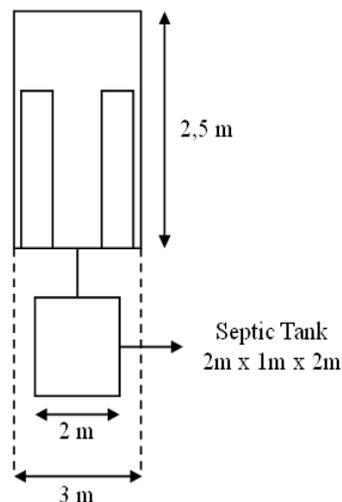
Gambar 9. Ilustrasi Penyaluran Air Bersih
Sumber: Ilmutekniksipil.com, 2022

Gambar di atas merupakan ilustrasi penyaluran air bersih ke MCK bersama. Air bersih dari PDAM disalurkan melalui pipa yang tersambung langsung ke keran di MCK bersama. Namun antara katup air PDAM dengan keran terdapat meteran air yang berfungsi untuk mencatat pemakaian air. Meteran air ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar jumlah air yang dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengatasi kebutuhan fasilitas MCK maka akan dilakukan pembangunan MCK yang dapat diakses langsung dari jalan.



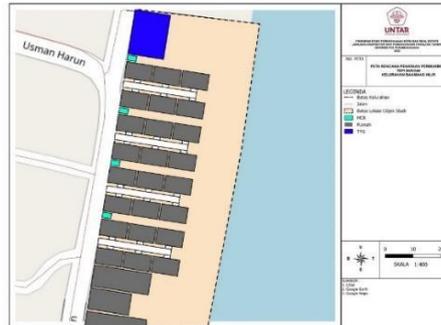
Gambar 10. Ilustrasi MCK Tampak Depan (kiri) dan Ilustrasi MCK Tampang Samping (kanan)
Sumber: Ruang-sipil.com, 2022

MCK ini berada di antara rumah warga dengan luas 3m x 2m yang terdiri dari dua kamar mandi. Selain itu juga terdapat peninggian di bagian depan MCK yang berbentuk tangga.



Gambar 11. Ilustrasi MCK dengan Septic Tank
Sumber: penulis, 2022

Setiap MCK terdiri dari 2 kamar mandi dengan panjang total 3m, lebar 2m, dan tinggi 2,5m. Maka setiap kamar mandi terdiri dari panjang 1,5 m dengan lebar 2m dan tinggi 2,5m. MCK ini dilengkapi dengan septic tank dengan ukuran panjang x lebar x tinggi yaitu 2m x 1m x 2m. Sehingga hasil pembuangan dari MCK tidak langsung dibuang ke sungai, melainkan ditampung dalam septic tank yang tersedia di setiap MCK. Untuk menangani masalah timbunan sampah diperlukan pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS). TPS direncanakan untuk dibangun di bagian utara lokasi objek studi.



Gambar 12. Rencana Lokasi TPS
Sumber: penulis, 2022

TPS terdiri dari dua bak terpisah yang berfungsi untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk memulai pemisahan ini diperlukan sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya memilah sampah. Selain itu juga diperlukan petugas yang bertugas untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. TPS yang akan dibangun yaitu TPS tipe III. TPS ini terdiri dari beberapa bagian yaitu ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, gudang, dan tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer. TPS memiliki panjang 29m dengan lebar 8,5m. Sehingga total luas TPS yaitu 246,5 m². TPS memiliki akses langsung ke jalan sehingga memudahkan petugas dalam proses pengumpulan maupun pemindahan sampah. Berikut merupakan ilustrasi pembangunan TPS.



Gambar 13. Ilustrasi TPS
Sumber: Gerai Arsitek, 2022

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, analisis, hingga konsep penataan, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi objek studi di Kelurahan Baamang Hilir termasuk dalam kategori permukiman kumuh sedang hingga tinggi. Lokasi objek studi yang berada pada jantung Kota Sampit merupakan kawasan wisata kuliner dengan unsur budaya dan sejarah yang masih kuat. Berdasarkan hasil analisis, konsep penataan berfokus pada aspek kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana yang diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan dua aspek lainnya yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Penataan menggunakan perpaduan konsep *on-site reblocking* atau penataan tata letak kawasan dengan *on-site upgrading* atau perbaikan fisik kawasan. Rumah di atas air dipindahkan dan dibangun dengan sistem rumah panggung mengikuti rumah tradisional yaitu rumah betang. Sedangkan bagi rumah di atas tanah tidak dipindahkan namun dirapikan kembali. Rumah di atas air tidak bisa dipindahkan ke atas tanah karena keterbatasan lahan dan mempertimbangkan unsur budaya serta sejarah yang masih kuat di masyarakat. Selain itu penataan juga berfokus pada fasilitas yang dibutuhkan di lokasi objek studi berupa sanitasi MCK, penyaluran air bersih, dan sistem pembuangan sampah.

Saran

Untuk dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman, perlu adanya kerja sama dari pihak pemerintah dengan masyarakat yang tinggal di lokasi objek studi agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi kedua belah pihak. Arahan penataan ini dibuat untuk memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai penataan kawasan kumuh di tepi Sungai Mentaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam mengatur pola ruang di lokasi objek studi serta kawasan sekitarnya. Perlu adanya perhatian khusus agar kawasan dapat tertata dengan baik tanpa melupakan unsur budaya dan sejarah yang masih melekat di masyarakat.

REFERENSI

- Andini, N. S. (2012). *Penataan Permukiman Di Atas Air Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang*. [Electronic version]. Malang: Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Baamang Dalam Angka 2019*. Kabupaten Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kecamatan Baamang Dalam Angka 2020*. Kabupaten Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Baamang Dalam Angka 2021*. Kabupaten Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2022*. Kabupaten Kotawaringin Timur: Badan Pusat Statistik.
- Badan Standardisasi Nasional. (2008). SNI 3242:2008. *Pengelolaan Sampah di Permukiman*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Budiharjo. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. (2006). *Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kabupaten Kotawaringin Timur. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035*. Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. (2016). *Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kementerian PUPR*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
- Pemerintah Indonesia. (1992). *Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perkim.id. (2020). *Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Konsep Collective Housing*, diunduh 12 Januari 2023, <https://perkim.id/kumuh/strategi-penataan-kawasan-permukiman-kumuh-dengan-konsep-collective-housing/#>.
- Rahman, B. (2017). *Hubungan Aktivitas Budaya Permukiman Bantaran Sungai*.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. INKOPPOL. Jakarta.